

**DIKTAT  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**MATA KULIAH EKONOMI KERAKYATAN**



**OLEH :  
KIROMIM BAROROH, M.Pd  
19790628 200501 2 001**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2010**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya, sehingga diktat ekonomi kerakyatan ini dapat terselesaikan.

Beberapa pihak telah memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian diktat ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang tersebut di bawah ini:

1. Bapak Dekan FISE yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual serta bantuan dalam bentuk lainnya.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual serta bantuan dalam bentuk lainnya.
3. Mahasiswa peserta kuliah ekonomi kerakyatan yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan ekonomi kerakyatan.

Penulis menyadari bahwa hal yang disajikan dalam diktat ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 25 Oktober 2010

Penulis,



Kiromin Baroroh, M.Pd.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I MENDESKRIPSIKAN KONSEP-KONSEP DALAM EKONOMI KERAKYATAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH EKONOMI KERAKYATAN.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III PEMBANGUNAN PEDESAAN.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB IV MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB V PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB VI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VIII STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN...</b>	<b>58</b>
<b>BAB IX KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN .</b>	<b>64</b>
<b>BAB X POLA-POLA KEMITRAAN.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## BAB I

### MENDESKRIPSIKAN KONSEP-KONSEP DALAM EKONOMI KERAKYATAN

#### A. Pengertian Sistem Ekonomi

Sebelum berbicara konsep ekonomi kerakyatan terlebih dahulu kita harus mengenal sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi.

Sebuah perekonomian terencana (*planned economies*) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (*market economic*), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor fisik (*physical resources*). Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi di era globalisasi ini. (Griffin R: 2006) Secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), sumber daya fisik (*physical resources*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan sumber daya informasi (*information resources*).

## Sumber daya fisik

Faktor produksi fisik ialah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan bahan mentah (*raw material*)

## Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokan berdasarkan kualitas (kemampuan dan keahlian) dan berdasarkan sifat kerjanya.

Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi *tenaga kerja terdidik*, *tenaga kerja terampil*, dan *tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih*. *Tenaga kerja terdidik* adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, misalnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. *Tenaga kerja terampil* adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Misalnya tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Sementara itu, *tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih* adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan latihan dalam menjalankan pekerjaannya. Misalnya tukang sapu, pemulung, dan lain-lain.

Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Misalnya guru, editor, konsultan, dan pengacara. Sementara itu, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Misalnya tukang las, pengayuh becak, dan sopir.

## **Modal**

Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan kepemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa pinjaman bank.

Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek.

Berdasarkan kepemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan.

Terakhir, modal dibagi berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik. Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya, bahan-bahan baku. Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebanyak dan sebagus apa pun faktor produksi alam, tenaga manusia, serta modal

yang dipergunakan dalam proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal. Sumber daya informasi

Sumber daya informasi adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya.

## **B. Macam-macam sistem ekonomi**

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah **perekonomian terencana** (*planned economies*) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada **perekonomian pasar** (*market economic*), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan

## **C. Pengertian ekonomi kerakyatan**

Keberadaan ekonomi rakyat justru tidak boleh dilihat dari segi pemihakan semata-mata, apalagi dari segi caritas-filantropis. Ekonomi rakyat justru mempunyai peran strategis di dalam sistem dan struktur ekonomi.

Dengan peran strategisnya ekonomi rakyat memberikan kontribusi sangat besar terhadap kehidupan ekonomi nasional.

Makna ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan itu, antara lain: (1) dengan rakyat yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai-nilai tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. (2) memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara kongkrit menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan

kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk investment (bukan pembeorosan atau inefficiency) serta mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis grass-roots (3) pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (self-empowering), sehingga rakyat mampu meraih nilai-nilai tambah ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial (nilai tambah kemartabatan). (4) pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat akan merupakan peningkatan collective bargaining position untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-nilai tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. (6) pembangunan ekonomi rakyat akan akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam negeri yang tersedia (endowment factor Indonesia) berdasar strategi resources-based dan people centered. (7) pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (8) pembangunan ekonomi rakyat akan cepat menghasilkan (quick-yielding) dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. (9) pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan import-components dan meningkatkan domestic-content produk-produk industri dalam negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu mengembangkan pasaran dalam negeri. (10) pemberdayaan pekonomian rakyat akan lebih memperkukuh pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasar luar negeri. (11) dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme . kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya dengan berbagai dalih ekonomi dan politik.pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi. (12) pembangunan perekonomian rakyat dapat dilaksanakan tanpa mempergunakan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar (13). pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan



demokratisasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas bagi pemihakan rakyat kecil.(14) perlu ada pergeseran paradigma-paradigma dalam pemikiran ekonomi (15) secara keseluruhan ide-ide di atas akan menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. (16) pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada platform bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa, dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonom (GNP) adalah derivat dari platform ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara.(17) dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian terbesar rakyat Indonesia, ditengah-tengah pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. (18) selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyat memberikan lapangan kerja dan juga memberikan kehidupan murah (low cost economy dan low cost of living) kepada rakyat khususnya kepada buruh-buruh korporasi-korporasi besar berupah rendah. Dan seterusnya. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Tentu kita tidak harus berhenti pada pasal 19 ini saja.(Sri Edi swasana, 2010)

#### **D. Karakteristik ekonomi kerakyatan**

Berdasarkan pendapat Mubyarto(1999;126) sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan aturan main yang baru perekonomian nasional Indonesia berbeda dalam banyak hal dengan aturan main lama. Produksi harus dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya harus dapat dibagi/didistribusikan secara merata kepada semua secara adil. Ini berarti semua usaha-usaha kecil, menengah maupun besar semuanya harus berpartisipasi dan bekerja sama dalam suasana secara kooperatif. Persaingan tidak ditabukan tetapi tidak boleh dalam suasana "saling mematikan"(free fight liberalism). Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.artinya negara menjamin tercapainya kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Setiap orang harus dapat bekerja (tidak boleh mengangur), sehingga dapat hidup secara layak sesuai harkat kemanusiaan.

Ekonomi krakyatan memiliki esensi (1) masyarakat emainkan peran sentral sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan yang menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembangunan. Semua lapisan rakyat bergerak mewujudkan

masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, pembangunan seperti itu adalah pembangunan dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. (2) hakikat ekonomi rakyat yaitu sistem ekonomi yang menjaga keseimbangan antara pelaku ekonomi skala kecil-menengah dan para pelaku ekonomi skala besar. Pemerintah melindungi para pelaku ekonomi rakyat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif mereka, sekaligus memberikan iklim pengembangan usaha nasional yang kondusif bagi semua pelaku ekonomi.

#### **E. Liberalisasi dan ekonomi kerakyatan**

Istilah liberalisasi sangat dekat dengan pasar bebas, pasar bebas merupakan pasar yang ditulis oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations* –disingkat *The wealth of Nations*. Pasar bebasnya Adam Smith bertitik tolak dari paham liberalisme dan individualisme (*perfect individual liberty* dengan *self interestnya* yang tidak menghendaki intervensi dari negara). Pasar bebasnya Adam Smith membentuk sistem ekonomi liberalisme dan neoliberalisme, yang melahirkan pengajaran ilmu ekonomi neoklasikal berdasar fundamentalisme pasar yang parsial (tidak utuh) dan mengemban asumsi-asumsi dasar atau mitos-mitos kapitalisme (Smithian) yaitu bahwa: (1) kebutuhan manusia diasumsikan tidak terbatas; (2) sumber-sumber ekonomi diasumsikan relatif terbatas; dan (3) diasumsikan pula bahwa manusia mengejar pemenuhan maksimal kebutuhan individualnya (*utility maximization of self-interest*) yang relatif tidak terbatas. Konsekuensi dari ketiga asumsi tersebut berkelanjutan dengan anggapan bahwa akhlak dasar manusia adalah bertarung untuk saling berebut yang disebut *free competition* dalam kehidupan ekonomi.

Paham ekonomi Adam Smith berdasar falsafah dan titik tolak liberalisme dan individualisme (*self interest*). Mekanisme pasar-bebas atau *laissez-faire* dikatakan oleh Adam Smith dioperasikan oleh *an invisible hand* atau sutau tangan tak nampak alias "tangan ajaib", yang bisa mengatur sendiri (*self-regulating*) dan mengoreksi segala kesalahan mekanisme ekonomi (*self correcting*) yang serba tahu (*omniscient*) dan serba perkasa.

Peran pasar memang penting, tetapi harus dikontrol negara. Stiglitz dan Akerlof (2009) menegaskan bahwa sistem pasar bebas perlu diwasapadai, kegagalan

pasar yang terlalu sering terjadi, telah menuntut ide-ide INET (Initiative for New Economic Thinking) seperti yang diajukan George Soros, Stiglitz dan Arkelof. Bagi pasal 33 UUD 1945, maka pasar haruslah ramah kepada rakyat dan kepentingan nasional, bukan sebaliknya negara yang harus ramah dan tunduk kepada pasar atau pun posisi rakyat dieksploitasi dan disubordinasi oleh kepentingan pasar. Pasal 33 UUD 1945 adalah konsepsi Hatta, bukan kiri bukan kanan tetapi jalan lurus sesuai Pancasila. Hal ini konsisten dengan konsepsi politik luar negerinya. Hatta bebas aktif yang bebas diartikan sebagai tidak mengekor AS ataupun US dan yang aktif diartikan sebagai secara mandiri mengartikulasikan kebijaksanaan nasionalnya secara lurus sesuai kepentingan nasional.

Indonesia merdeka berdasar pada doktrin kebangsaan (nasionalisme) dan doktrin kerakyatan (rakyat berdaulat). Dari sini lahirlah konsepsi politik ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi yang dipangku oleh pasal 33 UUD 1945. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia maka "kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan orang seorang" (walaupun kepentingan warga negara orang-seorang tidak boleh diabaikan).

Demokrasi ekonomi Indonesia menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, agar keselamatan dan keamanan negara terjamin. Subject maternya adalah "dikuasai oleh negara" apabila tidak bisa dikuasai tanpa dimiliki (karena berlakunya the global rule of the game dengan ketentuan imperatifnya tentang one share one vote yang sangat rigid), maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu haruslah dimiliki oleh negara. Demokrasi ekonomi menghendaki pula bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kehidupan dan kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara agar terjamin dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, jelas sangat strukturalistik. Artinya perekonomian secara imperatif harus disusun, tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai kehendak dan perilaku para penguasa pasar. Ketimpangan-ketimpangan antara kaya dan miskin, antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa, antara pengusaha

asing dan pengusaha nasional, harus direstruktur dengan campur tangan pemerintah agar daulat-pasar tidak menggusur daulat rakyat.

Menurut Gunawan sumodiningrat, (1999;68) istilah ekonomi rakyat sebenarnya mempunyai pengertian ekonomi usaha kecil sebagai upaya pemihakan. Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasioanal mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi (Gunawan sumodiningrat, 1999;70).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bambang Ismawan (2003). *Partisipasi dan Dimensi Keswadayaan: Pengalaman LSM Membangun Keswadayaan Masyarakat*. [www.ekonomirakyat.org/edisi15](http://www.ekonomirakyat.org/edisi15). diambil tanggal 19 Juli 2006
- Gunawan sumodiningrat, 1999; *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramdia Pustaka
- Hari Susanto (2006). *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan, Tinjauan Historis Era Orde Baru*. Jakarta: Khanata Pustaka LP3S
- Hastuti, dkk (2003). *Buku II Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan*. Jakarta Lembaga Penelitian Smeru & Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Indra ismawan. 2001. *Sukses Di Era Ekonomi Liberal. Bagi Koperasi Dan Perusahaan Kecil-Menengah*. Jakarta: Grasindo
- Griffin R. 2006. *Business*. New Jersey: Pearson Education "[http://id.wikipedia.org/wiki/Faktor\\_produksi](http://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi)
- Mubyarto, 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi. Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Soeharto Prawirokusumo, 2001. *Ekonomi Rakyat (konsep, kebijakan, dan strategi)*. Yogyakarta: BPFE
- Sri Edi swasana, 2010, *Membangun Ekonomi Indonesia. Pengembangan Karakter dan Patriotisme*. Orasi Ilmiah memperingati Dies Natalis ke-45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negei Yogyakarta, 18 September 2010: FISE UNY